

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afifudin dan Ahmad, Beni., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia
- Anonim, 2019, *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Asikin, Zainal., 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Basarah, Moch., 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Bandung, Genta Publishing
- Djais, Mochammad., 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Emirzon, Joni., 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fuady, Munir., 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Gautama, Sudargo., 1998, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Dari Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Gulo, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Grasindo
- Harahap, M. Yahya., 2001, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya., 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya., 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Longdong, Tineke Louise Teugeh., 1998, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 pada Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

- Lontoh, Rudy A, dkk., 2001, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni
- Margono, Suyud., 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* Cet. Ke-2, Bogor, Ghalia Indonesia
- Rajagukguk, Erman., 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra Pratama
- Sanjaya, Umar Haris., 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta, NFP Publishing
- Situmorang, Victor., dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri., 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Raja Grafindo
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sudiarto dan Asyhadie, Zaeni., 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Suherman, Ade Maman., 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sutantio, Retnowulan., dan Oeripkartawinata, Iskadar., 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mundur Maju
- Swantoro, Herri., 2018, *Dilema Eksekusi*, Jakarta, Rayyana Komunikasindo
- Usman, Rachmadi., 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Waluyo, Bambang., 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

Widjaja, Gunawan., dan Yani, Ahmad., 2001, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada

2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui

REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131)

Lampiran II. 10 PSAP Nomor 09 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

3. Perjanjian Internasional

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
(New York, 1958)

4. Putusan Pengadilan Indonesia

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/K/N/1999
perihal perkara kepailitan dari PT. Environmental Network Indonesia
(PT. ENINDO) vs PT. Putra Putri Fortuna Windu & PPF International
Corporation

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor :
23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST perihal penundaan kewajiban
pembayaran utang antara PT. Bank Central Asia Tbk sebagai Pemohon
PKPU melawan PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebagai Termohon
PKPU

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 40/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.
perihal penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Humpus Intermoda
Transportasi, Tbk sebagai Termohon PKPU

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-
lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor :
40/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt..Pst. perihal Gugatan Lain-Lain antara PT.
Graha Dana Abadi dan PT. Samudera Jaya Sakti sebagai Para Penggugat
melawan PT. Humpus Intermoda Transportasi, Tbk sebagai Tergugat

5. Putusan Pengadilan Badan Arbitrase Internasional

Putusan Arbitrase atas Sengketa yang Timbul sehubungan dengan
PERJANJIAN KERJASAMA Penjualan Kapal MT “APOLLO SUN”
(TOMAC-2008003)

6. Perjanjian Internasional Bilateral

PERJANJIAN KERJASAMA Penjualan Kapal MT “APOLLO SUN” antara
Apollo Tanker Corp. Liberia sebagai Penjual dan pihak PT. Arpeni
Pratama Ocean Line Tbk sebagai Pembeli

7. Artikel Jurnal

Anindita, Sashia Diandra., dan Amalia, Prita., “Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dri Hukum Internasional”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 1 September 2017

Anisah, Siti.,, “Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 1999

Sujitno, “Konflik Yurisdiksi antara Arbitrase dan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Magister Hukum, Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 19, Februari 2002

Tampongangoy, Grace Henni., “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. III, Nomor 1, Jan-Mar 2015

8. Penulisan Hukum / Tesis

Sunardi, Irwan., 2017, *Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Kepailitan Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/pdt.sus.pailit/2014/pn.niaga.jkt.pst)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jakarta

Toeberto, Delny., 2013, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Hal Adanya Putusan PKPU (Studi Kasus PT. Bakrie Swasakti Utama melawan Soetomo)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba

9. Website

Anonim, “Contracting States on Declarations and Reservations (Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification, accession or succession.)”, <http://www.newyorkconvention.org/countries>, diakses pada 1 Juli 2019

Anonim, “Kepailitan dan Arbitrase (2)”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl885/kepailitan-dan-arbitrase-2>, diakses pada 2 Juli 2019

Anonim, “Moratorium”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Moratorium>, diakses pada 6 Juni 2019

Anonim, “Status Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York 1958)”,
https://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html, diakses pada 25 Juli 2019

Dedi Kurniadi, “Memahami Perkara Lain-Lain Dalam Kepailitan”,
<https://www.dedykurniadi.com/memahami-perkara-lain-lain-dalam-kepailitan.html>, diakses pada 2 Juli 2019

Nirmala, “Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia”,
<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>, diakses pada 1 Juli 2019

Waruwu, Riki Perdana Raya., “Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA”,
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24, diakses pada 2 Juli 2019

10. Lain-lain

Permohonan Eksekusi Nomor : 50.eks/2016/PN.JKT.PST perihal Permohonan Eksekuatur atas Putusan Arbitrase atas Sengketa yang Timbul sehubungan dengan PERJANJIAN KERJASAMA Penjualan Kapal MT “APOLLO SUN” (TOMAC-2008003)

Rencana Perdamaian Restrukturisasi Kewajiban Pembayaran Utang PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 28 Oktober 2011, yang direvisipada tanggal 1 November 2011

Laporan Proses PKPU Sementara PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk

Keterangan dari Perwakilan Diplomatik Pejabat Kementerian Urusan Luar Negeri Tokyo yang menyatakan bahwa tanda tangan dan bahwa Cap Resmi yang terdapat dalam dokumen Permohonan *Aanmaning* tersebut adalah asli

Surat Nomor: W10.U1/1F13/50.2016.Eks/HT.02.I.2017.01.BD